

Politik Anggaran - Akuntabilitas keuangan daerah

ROY SALAM

Indonesia Budget Center (IBC)

Disampaikan pada:
Talk Series on Indonesia's Fight Against Corruption
Ruang Sidang Rektorat Univ Muhammadiyah Malang, 31 Mei 2011

Diselenggarakan oleh:
United Nations Office on Drugs and Crime
UNDOC

Latar Belakang

- Hakekatnya anggaran sebagai instrument akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi negara.
- Tujuan APBN/APBD, sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (amanah konstitusi)
- Desentralisasi fiskal mewajibkan tatakelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
- Lemahnya sanksi dan kontrol publik dalam ketentuan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab tumbuh subur nya praktek penyimpangan dan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.

“Anggaran adalah dokumen publik yang lahir dari proses dan kompromi kepentingan politik dalam lingkaran kekuasaan (eksekutif dan legislatif)”

Proses Penganggaran

- **Proses Politik :**

Proses-proses melalui Mekanisme Politik

- **Proses Teknis Ekonomi:**

Kalkulasi Ekonomi Berdasarkan Standar yang Berlaku

Kebijakan Anggaran

- Political Process
- Political Allocation
- Political Accountability

KONDISI YANG TERJADI

Korupsi masih menjadi momok dalam berbagai bentuk:

- Buruknya pengelolaan anggaran → Praktek mark down dan mark up anggaran kerap terjadi
- Praktek penyelewengan/komersialisasi jabatan, keputusan
- Penyelewengan informasi pengetahuan atau informasi

Mis-manajemen Anggaran memberikan efek buruk pada:

- Timbulnya inefisiensi dalam pengelolaan uang negara
- Meningkatnya biaya produksi sektor dasar publik.
- Mutu dan kualitas hasil pembangunan sangat rendah
- Derajat pelayanan publik memprihatinkan
- Timbulnya pemborosan dan kerugian keuangan negara baik di level pusat dan daerah.

Problem kemiskinan



sumber: data BPS, diolah

10 Propinsi Dengan Angka Kemiskinan Tertinggi

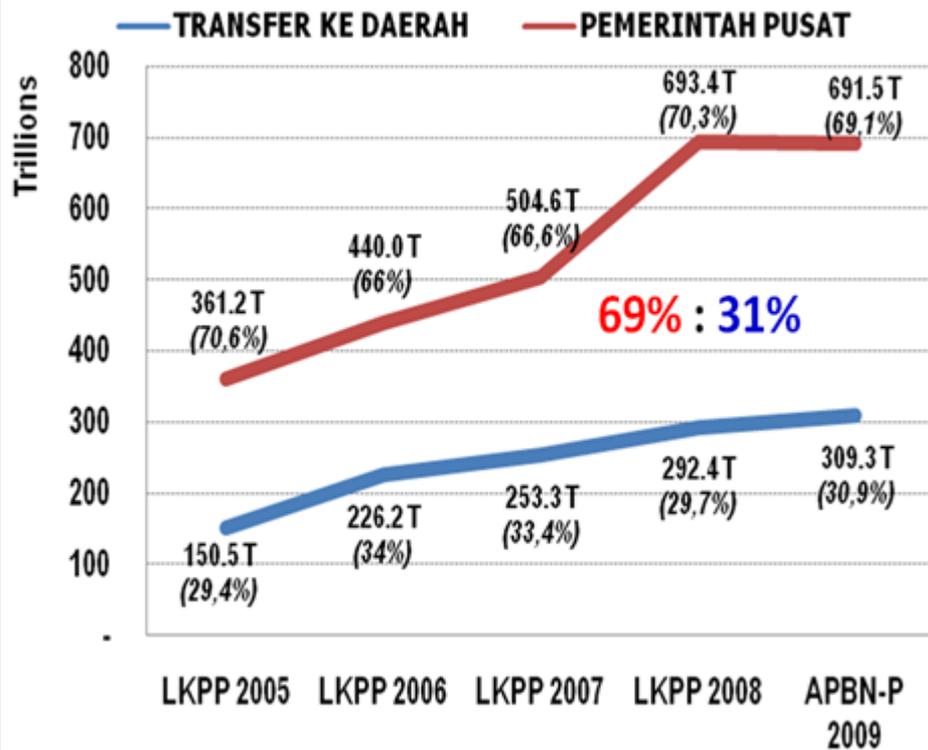
Peringkat	Propinsi	Angka Kemiskinan	
		Jml (jiwa)	%
1	PAPUA	761,600	36.80%
2	PAPUA BARAT	256,300	34.88%
3	MALUKU	378,600	27.74%
4	GORONTALO	209,900	23.19%
5	NTT	1,014,100	23.03%
6	NTB	1,009,400	21.55%
7	NAD	861,900	20.98%
8	LAMPUNG	1,479,900	18.94%
9	BENGKULU	324,900	18.30%
10	SULAWESI TENGAH	475,000	18.07%
Rata-Rata Nasional		31,023,400	13.33%

Sumber: IBC, diolah dari laporan bulanan BPS tentang data Sosial Ekonomi 2011

Kemiskinan masih menjadi momok dalam pembangunan. Implikasi dari distribusi anggaran yang timpang dan pengelolaan anggaran yang buruk secara tidak berkeadilan, terus melanggengkan kemiskinan.

APBN MASIH WEWENANG PUSAT

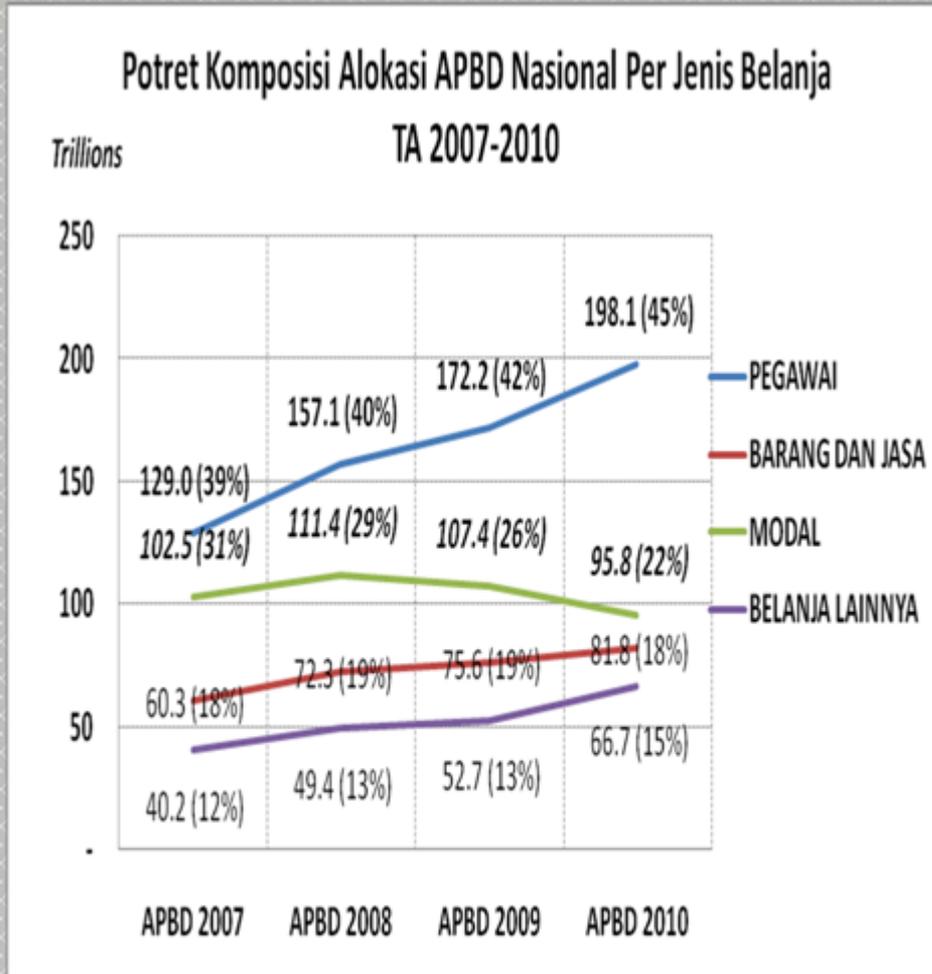
Trend Alokasi APBN Untuk Pusat & Daerah
Tahun 2005-2009



Sumber: Indonesia Budget Center, 2010

- Selama periode 2005 -2009, postur APBN mengalami peningkatan dari sisi belanja hingga 2 kalilipat dari Rp 511,62 triliun (2005) menjadi Rp 1,000.8 triliun (2009). Akan tetapi, kebijakan distribusi alokasi APBN belum banyak mengalami perubahan.
- Sekitar **69%** APBN setiap tahunnya dikelola oleh kementerian dan lembaga Negara sedangkan daerah hanya memperoleh bagian **31%**.
- Kenaikan belanja transfer tertinggi terjadi pada tahun 2006 mencapai **34%**.

Rendahnya Kinerja Daerah mengelola APBD



Sumber Data: diolah dari www.sikd.go.id

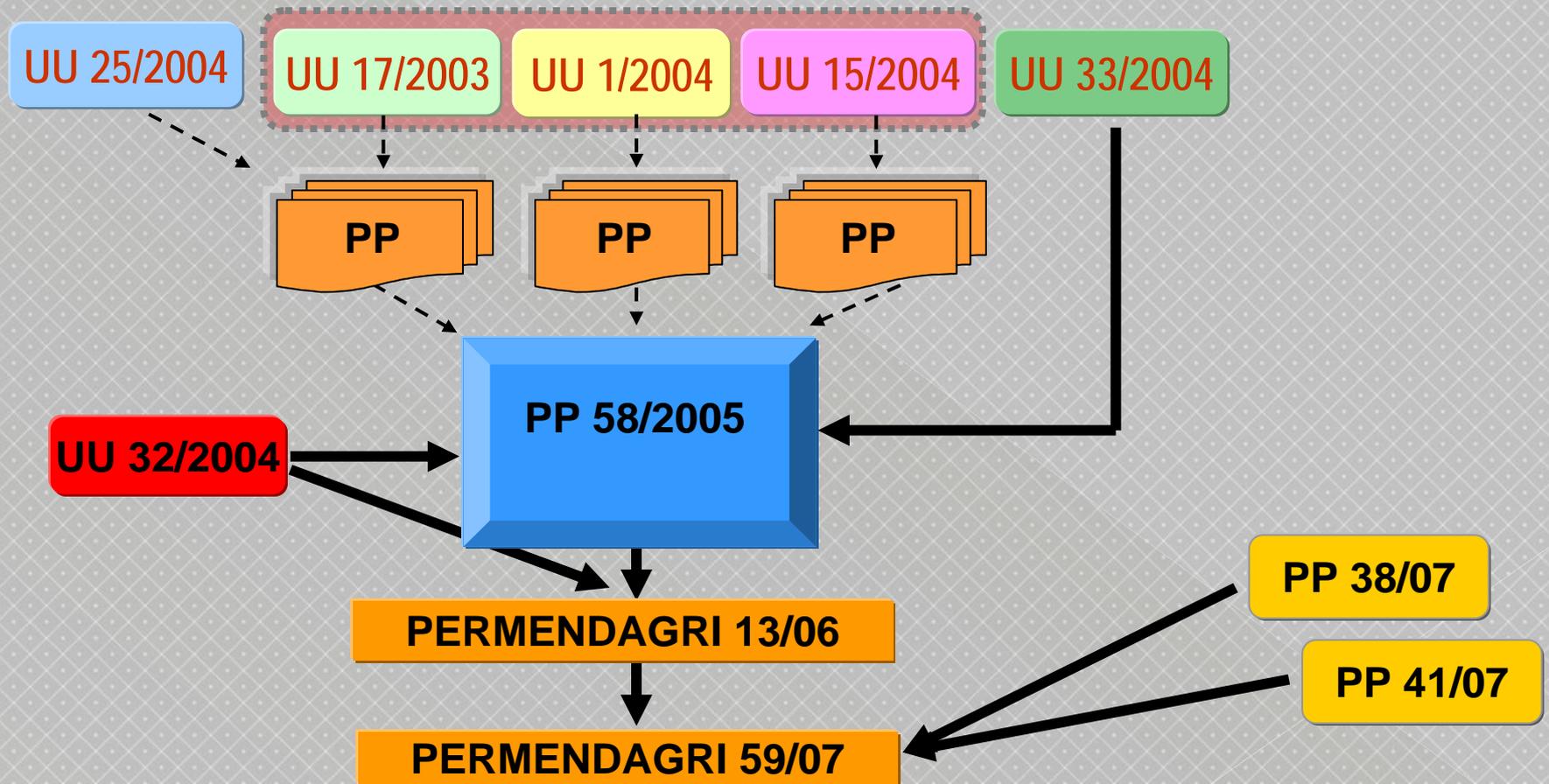
APBD 2007 mencakup 440 (Propinsi/Kab/Kota) ; APBD 2008 mencakup 483 (Propinsi/Kab/Kota);
APBD 2009 mencakup 482 (Propinsi/Kab/Kota); APBD 2010 mencakup 522 (Propinsi/Kab/Kota)

- Pengeluaran APBD tiap tahunnya rata-rata lebih banyak diporsikan untuk kebutuhan belanja pegawai (**42%**), lalu diikuti belanja modal **27%**, belanja barang dan jasa **18%** serta **13%** untuk belanja lainnya (hibah, bansos, bunga).
- Dilihat dari trendnya, belanja pegawai terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Terlihat 2007 alokasinya mencapai 39% naik menjadi 45% (2010). Hal tersebut berbanding terbalik dengan alokasi belanja modal pembangunan daerah yang mengalami **penurunan**, dimana tahun 2007 alokasinya mencapai 31% turun menjadi 22% (2010).
- Meskipun penurunan belanja modal di tahun 2010 disebabkan perubahan kebijakan alokasi DAK dialihkan ke belanja hibah, namun belanja Modal tetap saja masih terdapat pengurangan belanja modal untuk pembiayaan honor-honor pegawai.

Prinsip perubahan paradigma keuangan daerah

- Desentralisasi Fiskal (Kejelasan Hak dan Kewajiban);
- Akuntabilitas (Clarity of Responsibility);
- Transparansi (Pelibatan dan Akses Informasi kepada Masyarakat, Keterbukaan Proses dan Dokumen Anggaran);
- Profesionalisme (Kompetensi dan Pengembangan Instrumen Teknis dalam Pengelolaan Keuangan Daerah)

LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN APBN/APBD



Esensi kebijakan desentralisasi fiskal

Kebijakan desentralisasi fiskal mengatur hak dan kewajiban Pemerintah Daerah di bidang keuangan yang mencakup :

1. Hak :

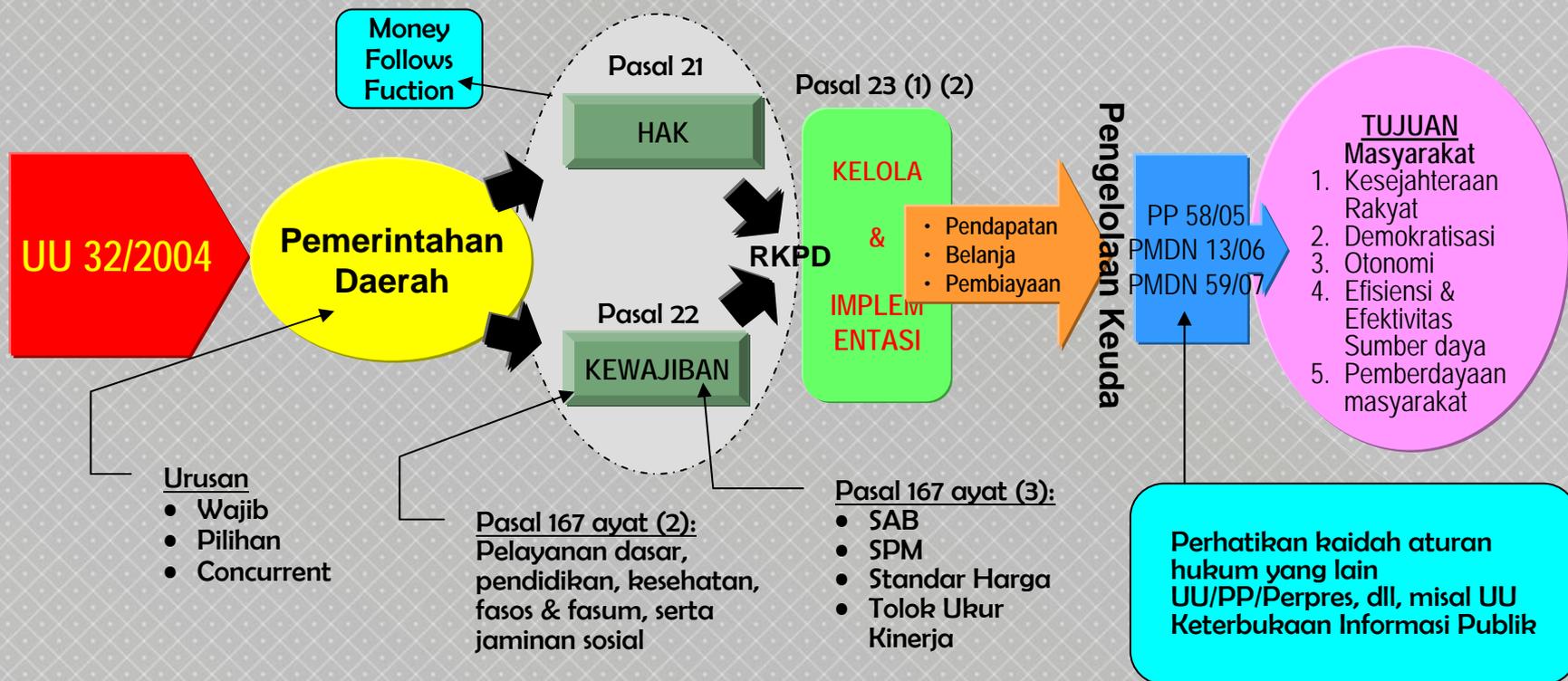
- Menetapkan pajak dan retribusi;
- Memperoleh Dana Perimbangan;
- Melakukan pinjaman.

2. Kewajiban :

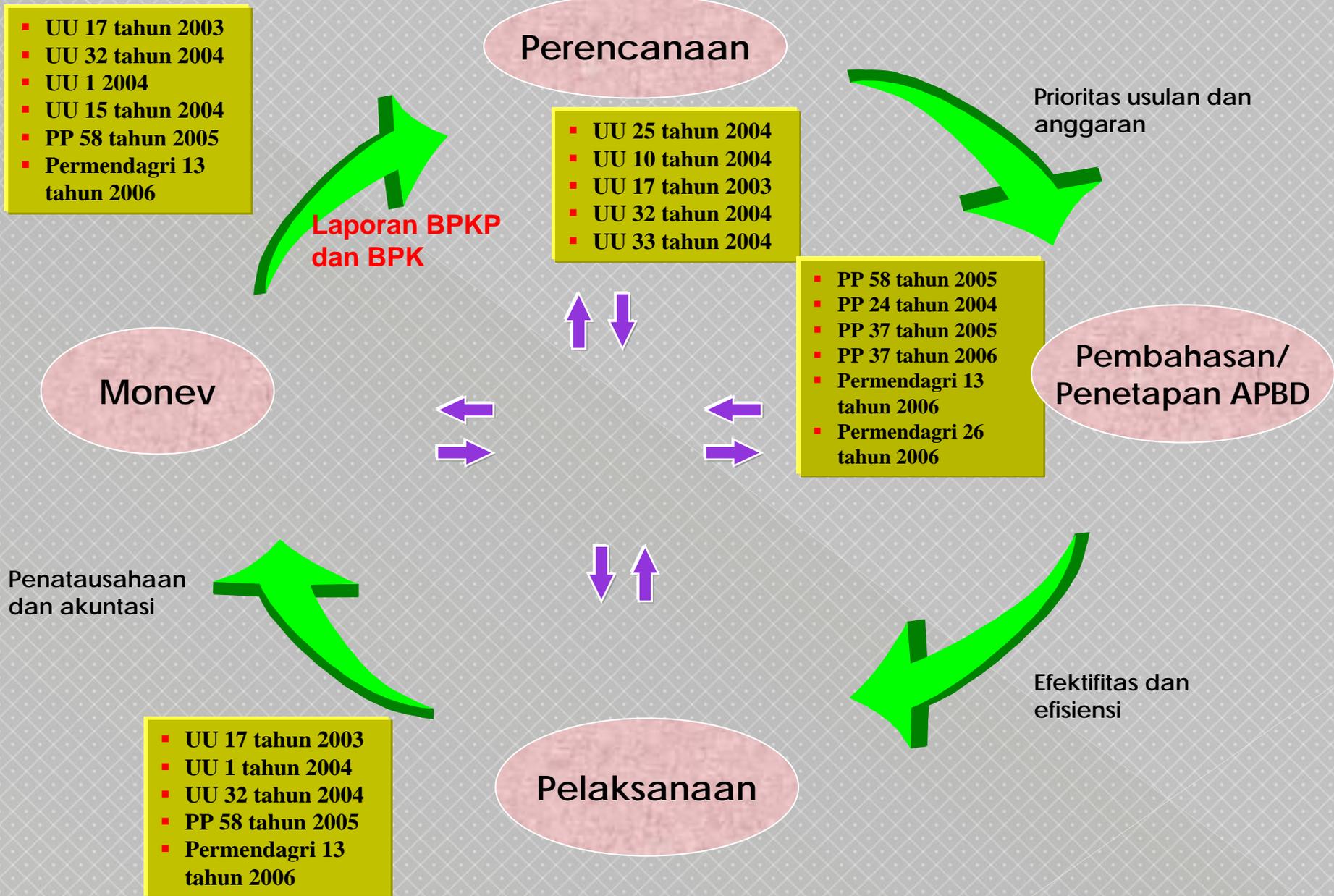
- Mengelola haknya secara efisien dan efektif;
- Sinkronisasi dengan kebijakan yang lebih tinggi;
- Melaporkan dan mempertanggungjawabkan

Tujuan dan Disain Utama Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Mempertajam esensi sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
2. Memperjelas distribusi kewenangan dan memperjelas derajat pertanggungjawaban pada level penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.



Siklus Anggaran



Hambatan Akses Informasi

- ❑ Masyarakat belum banyak mengetahui dan memahami tahapan siklus anggaran, aktor yang berperan serta dokumen apa saja yang terkait dengan anggaran.
- ❑ Akses masyarakat atas informasi anggaran belum terlaksana sesuai harapan → meskipun prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas diatur dalam berbagai regulasi penganggaran negara/daerah.

Proses Partisipasi Dalam Siklus Anggaran

Terlibat – Kontrol dlm evaluasi proses dan hasil, serta ikut Menentukan Bgm kelanjutannya Program pembangunan

Perencanaan

Partisipasi:Memiliki akses informasi secara utuh& lengkap

Prioritas usulan dan anggaran

**Pembahasan/
Penetapan APBD**

Terlibat Penuh dlm pembahasan pengambilan keputusan *penetapan APBD*

Efektifitas dan efisiensi

Pelaksanaan

memiliki akses informasi atas pelaksanaan program pembangunan

Monev

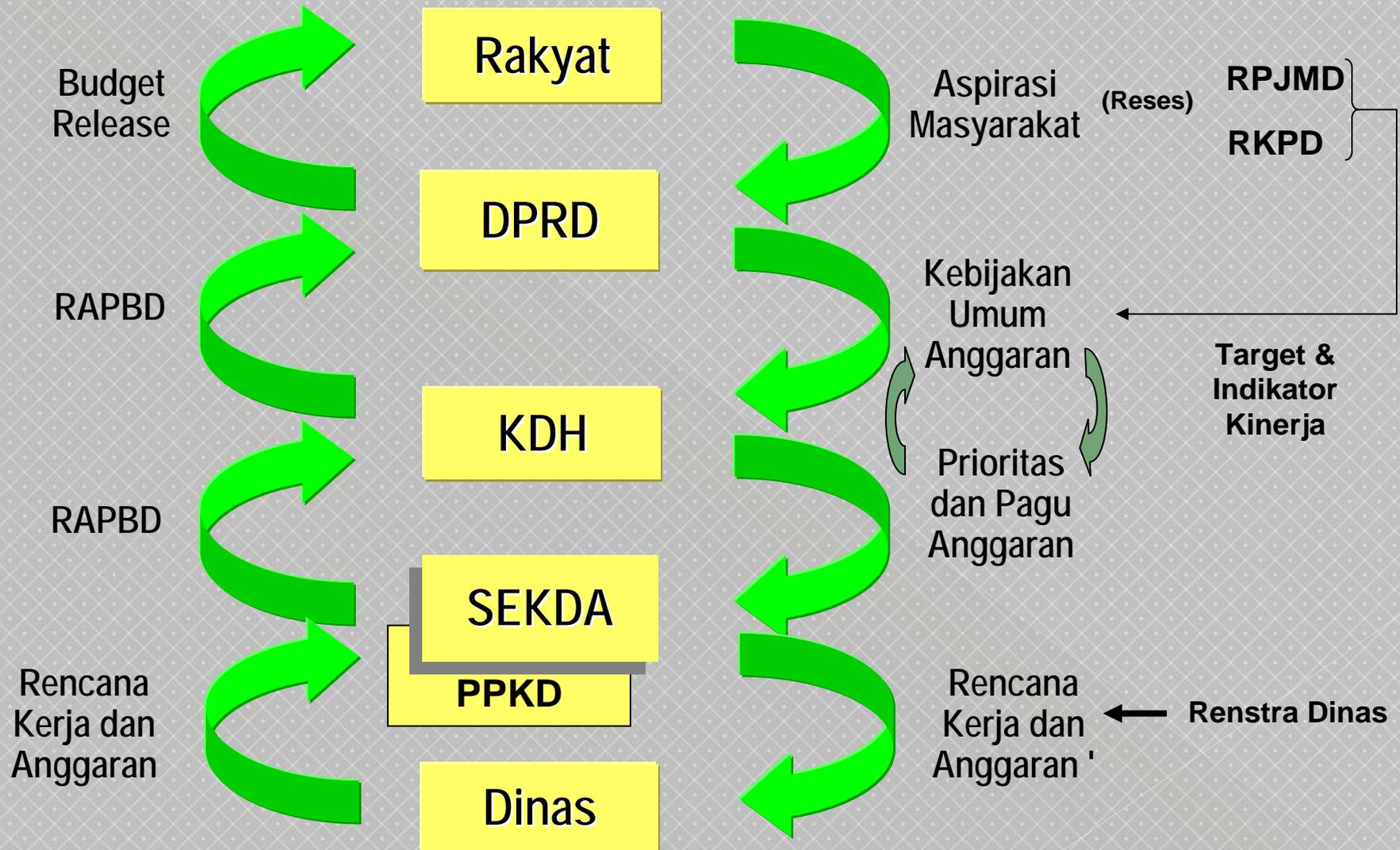
● IDEAL

Muncul benturan antar politik dan anggaran. Anggaran digunakan sebagai optimalisasi negosiasi berbagai kelompok melalui proses terbuka, siapapun dapat berperan dan seluruh hasilnya merepresdentasikan berbagai kepentingan, tidak adanya dominasi. Perubahan anggaran diarahkan kerah yang substantif bagi aspirasi dan kebutuhan rakyat.

● FAKTA

Kelompok kepentingan sebagai actor yang dominan dalam proses anggaran. ekstremnya, kelompok kepentingan yang berkuasa menentukan anggaran. Distrubisi dan alokasinya jauh dari rasa keadilan rakyat. Plus akuntabilitasnya semu

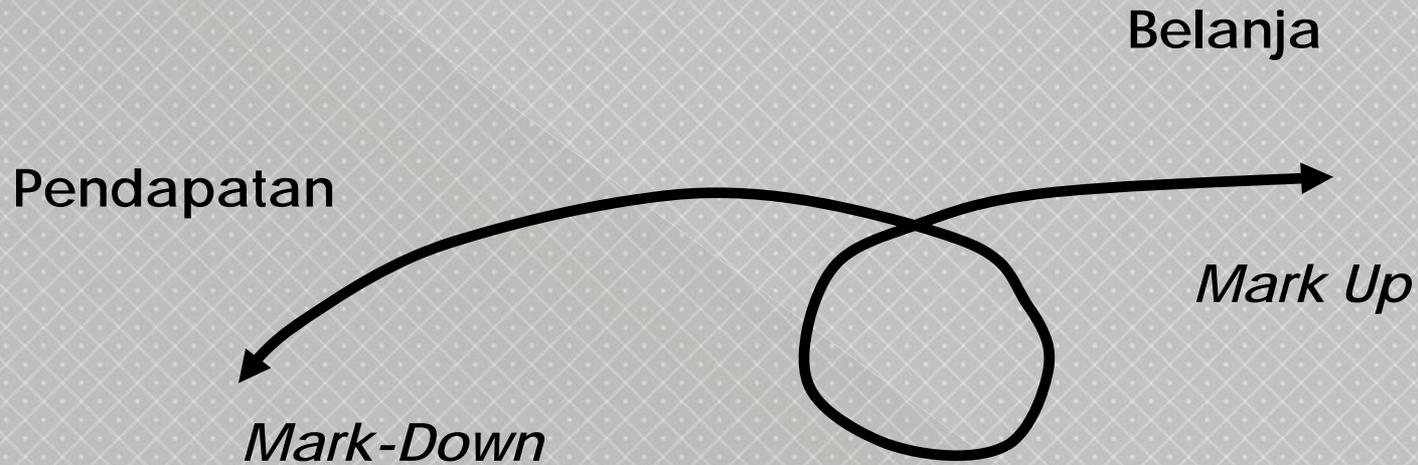
AKUNTABILITAS PENYUSUNAN ANGGARAN KINERJA



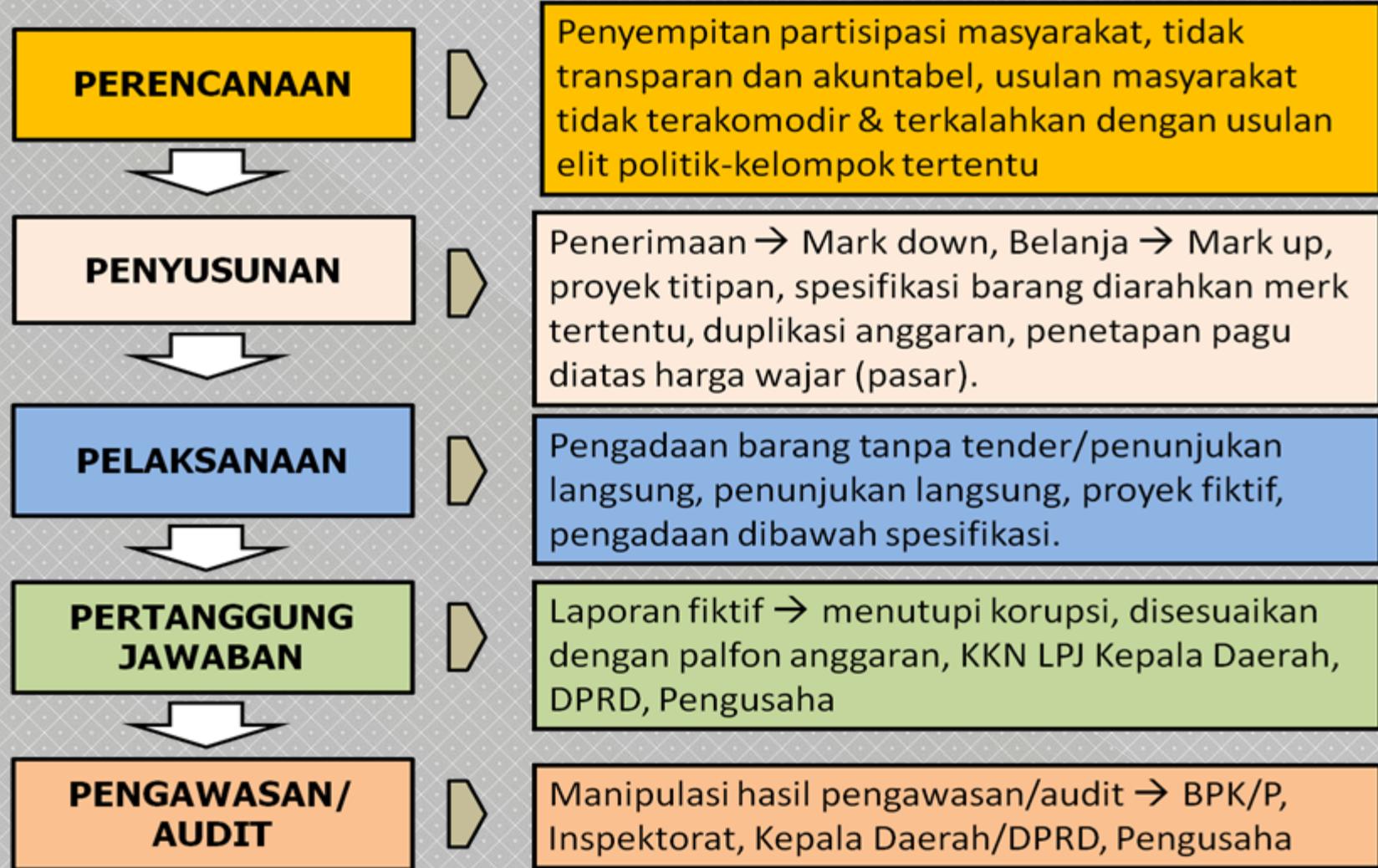
Peran DPRD

- ◉ Memantau dinamika layanan dasar publik dan assesment problem solving atau referensi riset sebagai bahan pembahasan proses penganggaran anggaran
- ◉ Aktif terlibat dalam setiap pengambilan keputusan anggaran yang menyangkut daerah pemilihannya.
- ◉ Monitoring perkembangan daerah pemilihan (konstituennya), apakah diakomodasi dalam pembuatan kebijakan anggaran khusus terkait dengan layananan dasar
- ◉ Bersama konstituen ikut mengevaluasi program-program layanan dasar di daerah pemilihannya (manfaat, partisipasi, akses, kontrol)
- ◉ Membuka akses bagi konstituen untuk selalu menyampaikan aspirasinya.
- ◉ Mendorong transparansi dan akuntabilitas proses penganggaran yang dilakukan oleh eksekutif dan antar eksekutif-legislatif
- ◉ Juga Partai dapat membuka ruang penilaian yang berbasis konstituen terhadap kinerja kadernya di parlemen

Celah Penyimpangan Anggaran



BEBERAPA MODUS PENYIMPANGAN APBD YANG MASIH SAJA TERJADI



“ketertutupan informasi anggaran menjadi indikasi celah penyalahgunaan anggaran publik oleh penyelenggara Negara”

Akuntabilitas keuangan masih menjadi kendala desentralisasi

Perkembangan Opini LKPD TH 2007-2009

OPINI BPK	LKPD					
	2007		2008		2009	
	JML	%	JML	%	JML	%
WTP	4	1	13	3	15	3
WDP	283	60	323	67	330	66
TW	59	13	31	6	48	10
TMP	123	26	118	24	106	21
JUMLAH	469	100	485	100	499	100

Opini WTP dan WDP atas laporan keuangan daerah trendnya meningkat. Namun, opini TW dan TMP masih tinggi

Sumber: BPK, semester II 2010

opini disclaimer masih cukup tinggi baik di pemerintah propinsi, kabupaten maupun kota

Opini LKPD TH 2009 Sesuai Level Pemerintahan

DAERAH	LKPD 2009								
	WTP	%	WDP	%	TM	%	TMP	%	TOTAL
Propinsi	1	3%	24	73%	3	9%	5	15%	33
Kabupaten	7	2%	240	64%	37	10%	90	24%	374
Kota	7	8%	66	72%	8	9%	11	12%	92
JUMLAH	15	3%	330	66%	48	10%	106	21%	499

Sumber: BPK, semester II 2010

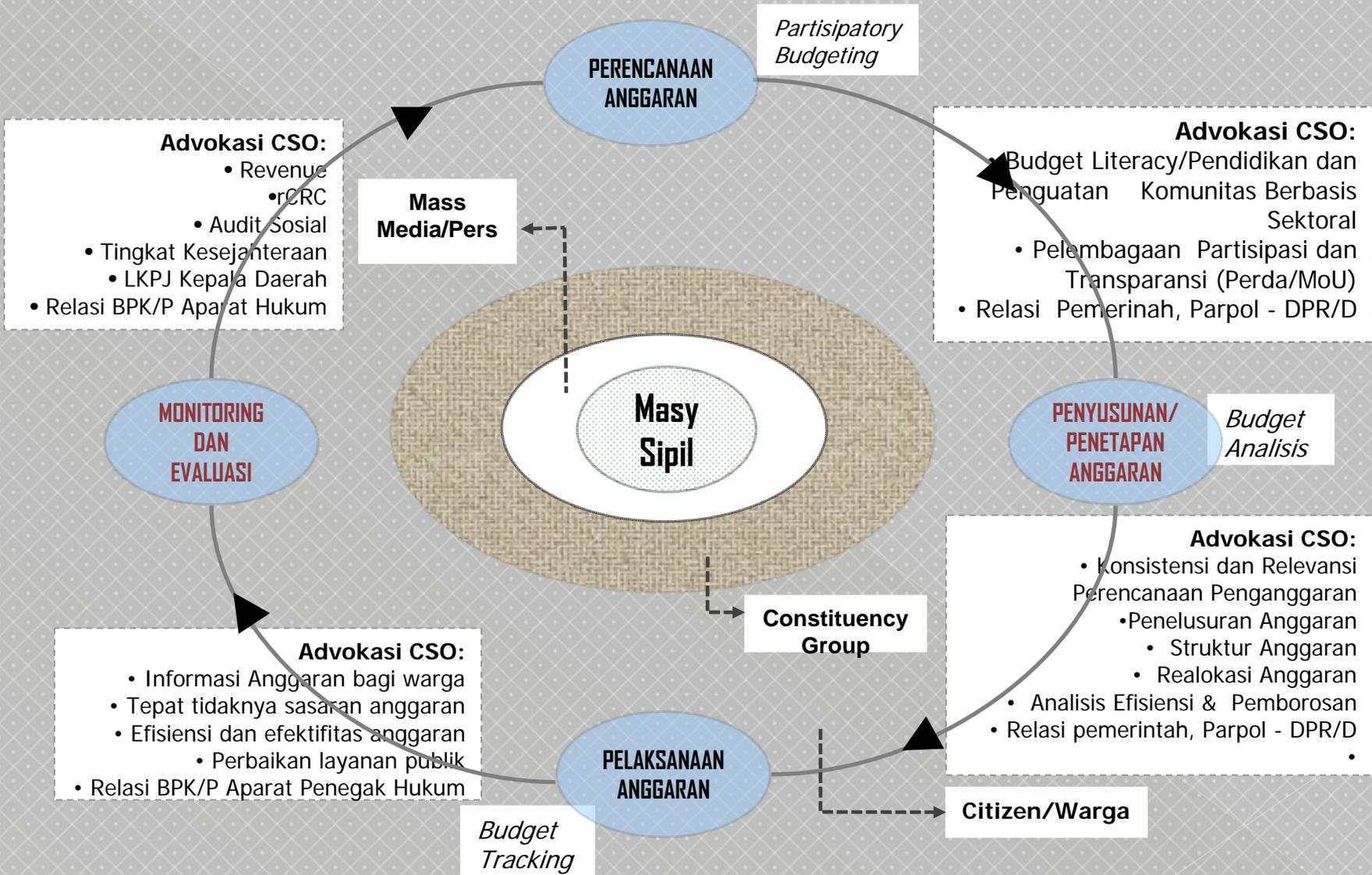
REFORMASI PEMERINTAHAN YANG DIPERLUKAN

- Perubahan mindset aparat birokrasi dan politisi terkait
- Perlu dihindari proses dan dokumen perencanaan yang berlebihan (redundan).
- Di tingkat daerah harus terjadi integrasi antara perencanaan dengan penganggaran.
 - > Perda
 - > Kelembagaan
- Untuk menghindari usulan kegiatan yang banyak dan skalanya kecil, maka Dana Alokasi untuk Desa menjadi penting.
- SK Gubernur/Bupati/Walikota harus ditempatkan sebagai standard prosedur operasi (SOP) bagi pelaksanaan APBD.
- Monitoring dan evaluasi tidak hanya sebatas pengisian dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kegiatan Instansi Pemerintah), melainkan juga harus dikembangkan metode monitoring dan evaluasi yang berorientasi pada kinerja yang dinilai oleh pengguna.

SYARAT PERLU: MASYARAKAT SIPIL

- Masyarakat sipil harus melek terhadap data dan informasi mengenai kebijakan publik yang ada dalam berbagai dokumen kebijakan –termasuk dokumen perencanaan dan dokumen anggaran.
- Masyarakat sipil harus segera mengkonsolidasi diri untuk segera masuk dalam proses-proses pembuatan kebijakan.
- Kepemimpinan masyarakat sipil yang berorientasi pada kepentingan masyarakat/komunitas dengan terhindar dari kooptasi dan konflik kepentingan menjadi syarat penting.

PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN DAERAH



APBD Partisipatif

Manfaat penganggaran partisipatif :

- Menguatnya fenomena warga aktif dan pembelajaran politik. Pemerintah dan warga terlibat secara aktif dalam proses kebijakan publik dan menciptakan system social, politik dan ekonomi yang ajeg.
- Terciptanya keadilan social → secara dialektik kebijakan publik dan alokasi sumber daya publik diperbaiki secara terus menerus.
- Berkurangnya kesenjangan gap kaya dan miskin, karena si miskin mendapatkan jaminan sumber daya publik yang lebih baik.
- Ada kecenderungan meningkatnya alokasi sumber daya publik yang berasal dari pajak. Hal ini, karena warga mengetahui manfaat pajak yang dibayarkan dan pengalokasiannya secara bersama.
- Mendekatkan pemerintah dengan warga. Tatanan penyelenggaraan pemerintahan, menjadi terdesentralisasi yang diberikan kewenangan untuk urusan tertentu.

Terima kasih...

SELAMAT BERDISKUSI

Indonesia Budget Center (IBC)

Jln.Jatipadang III No 24C Pasar Minggu Jakarta Selatan 12540

Telefax (021) 7819604

Email: indonesia_budgetcenter@yahoo.com